

ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN APBD DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

May Sendika¹, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴

^{1,2,3,4}Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang,

¹maysendika@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional development strategy of Bukittinggi City based on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for 2024 and its budget allocation changes. The main problem of the research is how APBD changes reflect development priorities and their implications for the regional economy. This study employs a quantitative descriptive method with financial ratio analysis and comparative evaluation between the budget before and after amendments. Secondary data was obtained from official documents of the Amended Regional Budget Regulation for Fiscal Year 2024 of Bukittinggi City. The research findings indicate an increase in regional revenue of IDR 17.42 billion (2.30%), primarily from intergovernmental transfers which increased by IDR 19.17 billion (56.90%). Capital expenditure experienced a significant increase of IDR 3.36 billion (5.00%), particularly in road, network, and irrigation spending which increased by 86.52%. These findings indicate that the Bukittinggi City Government prioritizes infrastructure development as the main strategy to enhance connectivity and regional economic growth, consistent with regional development theory emphasizing the importance of capital investment in stimulating long-term economic growth.

Keywords: *regional budget, regional development, capital expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan perubahan alokasi anggarannya. Masalah utama penelitian adalah bagaimana perubahan APBD mencerminkan prioritas pembangunan dan implikasinya terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan dan evaluasi komparatif antara APBD sebelum dan sesudah perubahan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp17,42 miliar (2,30%), terutama dari dana transfer antar daerah yang meningkat Rp19,17 miliar (56,90%). Belanja modal mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3,36 miliar (5,00%), khususnya pada belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang meningkat 86,52%. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota

Bukittinggi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan teori pembangunan regional yang menekankan pentingnya investasi modal dalam memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kata Kunci: APBD, pembangunan daerah, belanja modal

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan komponen integral dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Bird & Ebel, 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen fiskal strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah (Boex, 2024). Sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, APBD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga merefleksikan prioritas pembangunan yang dipilih pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan (Calderón & Servén, 2010). Melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang

inklusif. Efektivitas pengelolaan APBD juga berimplikasi langsung terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang transformatif dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi regional. Posisinya sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan perdagangan di kawasan Sumatera Barat bagian tengah menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien (Aditya et al., 2024). Dalam konteks desentralisasi fiskal, kemampuan daerah mengelola

APBD menjadi indikator penting kemandirian dan daya saing regional (Zhang et al., 2016).

Tahun 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan perubahan APBD yang mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan. Perubahan ini melibatkan realokasi anggaran pada berbagai pos pendapatan dan belanja yang perlu dianalisis untuk memahami implikasi strategisnya (Mandey, 2022). Fenomena perubahan APBD merupakan praktik umum dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang dinamis dan kebutuhan pembangunan yang berkembang (Voitenko et al., 2022).

Data APBD Perubahan Kota Bukittinggi tahun 2024 menunjukkan peningkatan total pendapatan dari Rp756,77 miliar menjadi Rp774,18 miliar, mencerminkan pertambahan sebesar Rp17,42 miliar atau 2,30%. Peningkatan ini terutama bersumber dari dana transfer antar daerah yang naik signifikan sebesar Rp19,17 miliar (Perda Kota Bukittinggi, 2024). Di sisi belanja, terjadi peningkatan total belanja sebesar Rp472,89 juta, dengan alokasi belanja modal

mengalami kenaikan substansial Rp3,36 miliar atau 5,00%.

Perubahan struktur APBD ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai strategi pembangunan yang diadopsi Pemerintah Kota Bukittinggi. Literatur pembangunan regional menekankan bahwa alokasi belanja modal, khususnya untuk infrastruktur, memiliki dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Calderón & Servén, 2010; Kodongo & Ojah, 2016). Penelitian di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa investasi infrastruktur publik berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas regional dan pengurangan kesenjangan antardaerah (Estache et al., 2005).

Dalam konteks Indonesia, studi mengenai hubungan APBD dengan pembangunan daerah telah banyak dilakukan (Marlina, 2023; Sahrudin, 2020). Namun, analisis mendalam mengenai implikasi perubahan APBD terhadap strategi pembangunan di kota menengah seperti Bukittinggi masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana realokasi

anggaran dalam APBD Perubahan 2024 mencerminkan prioritas pembangunan daerah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan alokasi APBD untuk mencapai target pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademis bagi kajian desentralisasi fiskal dan pembangunan regional di Indonesia, khususnya untuk daerah dengan karakteristik serupa Kota Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pembangunan daerah Kota Bukittinggi berdasarkan perubahan struktur APBD tahun 2024, mengidentifikasi prioritas alokasi anggaran pada berbagai sektor pembangunan, dan mengevaluasi implikasi perubahan APBD terhadap kapasitas fiskal dan prospek pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya

literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan regional, serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pembangunan daerah berdasarkan data APBD Kota Bukittinggi tahun 2024. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menginterpretasi kondisi atau fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang tersedia (Zhang et al., 2016). Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis numerik terhadap data keuangan APBD untuk mengidentifikasi pola alokasi anggaran dan implikasinya terhadap pembangunan daerah (Boex & Martinez-Vazquez, 2006).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Lampiran I Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi. Data mencakup ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Penggunaan data resmi pemerintah daerah menjamin validitas dan reliabilitas data yang dianalisis (Calderón & Servén, 2010). Dokumen ini mencakup informasi detail mengenai struktur pendapatan daerah, komposisi belanja daerah, dan mekanisme pembiayaan daerah.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio keuangan daerah dan analisis komparatif. Analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan berbagai indikator seperti rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan, dan rasio belanja modal terhadap total belanja (Marlina, 2023). Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan angka APBD sebelum dan sesudah perubahan untuk mengidentifikasi pergeseran prioritas alokasi anggaran. Perhitungan persentase perubahan dilakukan untuk setiap pos pendapatan dan belanja guna mengidentifikasi pos-pos yang mengalami perubahan signifikan (Kodongo & Ojah, 2016).

Prosedur analisis dimulai dengan tabulasi data APBD ke dalam format yang sistematis, dilanjutkan dengan perhitungan berbagai rasio keuangan dan persentase perubahan. Interpretasi hasil dilakukan dengan merujuk pada teori pembangunan regional dan literatur relevan mengenai hubungan antara alokasi fiskal dengan pembangunan daerah (Estache et al., 2005). Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data satu periode anggaran yang membatasi kemampuan menganalisis tren jangka panjang, serta tidak melibatkan data primer dari stakeholder pembangunan daerah yang dapat memberikan perspektif kualitatif lebih mendalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Struktur Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis data APBD Perubahan Kota Bukittinggi tahun 2024, terjadi peningkatan total pendapatan daerah dari Rp756,77 miliar menjadi Rp774,18 miliar, menunjukkan pertambahan sebesar Rp17,42 miliar atau 2,30%. Peningkatan ini mencerminkan upaya

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung program pembangunan (Bird & Ebel, 2018). Struktur pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer yang mencapai 80,18% dari total pendapatan setelah perubahan, menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi (Boex, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan moderat sebesar Rp300 juta (0,20%) dari Rp153,16 miliar menjadi Rp153,46 miliar. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, komponen PAD menunjukkan dinamika yang menarik. Retribusi daerah meningkat signifikan sebesar Rp635 juta (0,86%), mencerminkan intensifikasi pemungutan retribusi pelayanan publik (Calderón & Servén, 2010). Sebaliknya, lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan Rp335 juta (-2,01%), yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pendapatan jangka panjang. Rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 19,82% mengindikasikan kemandirian fiskal yang masih rendah dan ketergantungan tinggi pada dana transfer (Zhang et al., 2016).

Pendapatan transfer mengalami peningkatan substansial sebesar Rp17,12 miliar (2,84%). Peningkatan terbesar terjadi pada pendapatan transfer antar daerah yang naik Rp19,17 miliar (56,90%) dari Rp33,69 miliar menjadi Rp52,86 miliar. Kenaikan dramatis ini kemungkinan bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi atau dana penyesuaian yang bersifat khusus (Kodongo & Ojah, 2016). Sebaliknya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan Rp2,05 miliar (-0,36%), dari Rp569,92 miliar menjadi Rp567,87 miliar, yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah mengingat dana ini merupakan sumber pendapatan utama.

Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah

Kota Bukittinggi Tahun 2024

Uraian	Sebelum (Rp Miliar)	Sesudah (Rp Miliar)	Perubah an (Rp Miliar)	Perubah an (%)
Pendapatan Asli Daerah	153,16	153,46	0,30	0,20%
- Pajak Daerah	54,11	54,11	0,00	0,00%
- Retribusi Daerah	74,05	74,69	0,64	0,86%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8,31	8,31	0,00	0,00%
- Lain-lain PAD yang Sah	16,69	16,35	-0,34	-2,01%

Pendapat an	603,61	620,72	17,12	2,84%
Transfer				
- Transfer Pemerintah Pusat	569,92	567,87	-2,05	-0,36%
- Transfer Antar Daerah	33,69	52,86	19,17	56,90%
Total Pendapat an	756,77	774,18	17,42	2,30%

Sumber: Data diolah dari Lampiran I Perda APBD Perubahan Kota Bukittinggi TA 2024

2. Analisis Struktur Belanja Daerah

Total belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp806,77 miliar menjadi Rp807,24 miliar, menunjukkan kenaikan sebesar Rp472,89 juta atau 0,06%. Perubahan struktur belanja mencerminkan realokasi prioritas pembangunan yang lebih fokus pada investasi infrastruktur (Estache et al., 2005). Belanja operasi yang merupakan komponen terbesar (89,94% dari total belanja) mengalami penurunan Rp2,89 miliar (-0,40%), menunjukkan efisiensi dalam belanja rutin pemerintahan (Voitenko et al., 2022).

Belanja modal mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp3,36 miliar (5,00%) dari Rp67,20 miliar menjadi Rp70,56 miliar.

Kenaikan ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah untuk

meningkatkan investasi infrastruktur yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi (Calderón & Servén, 2010). Komponen belanja modal menunjukkan dinamika yang beragam. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami peningkatan luar biasa sebesar Rp9,36 miliar (86,52%), dari Rp10,81 miliar menjadi Rp20,17 miliar, menunjukkan prioritas tinggi pada pembangunan konektivitas regional (Kodongo & Ojah, 2016).

Sebaliknya, belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan Rp4,28 miliar (-11,02%), dari Rp38,81 miliar menjadi Rp34,53 miliar. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran prioritas dari pembangunan fisik gedung menuju infrastruktur jaringan yang lebih produktif (Zhang et al., 2016). Belanja modal peralatan dan mesin juga turun Rp2,07 miliar (-12,63%), yang perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas pelayanan publik. Munculnya belanja modal aset lainnya sebesar Rp200 juta menunjukkan diversifikasi jenis investasi pemerintah daerah.

Efisiensi belanja operasi tercermin dari penurunan belanja

pegawai sebesar Rp2,88 miliar (-0,83%) dan belanja hibah sebesar Rp1,19 miliar (-2,04%). Pengurangan ini mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja aparatur dan mengalihkan dana untuk investasi produktif (Boex, 2024). Belanja barang dan jasa meningkat Rp1,44 miliar (0,45%), yang diperlukan untuk mendukung operasional program dan kegiatan pembangunan. Defisit anggaran berkurang dari Rp50 miliar menjadi Rp33,06 miliar, menunjukkan perbaikan keseimbangan fiskal yang signifikan (Bird & Ebel, 2018).

Tabel 2. Komposisi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

Uraian	Sebelum (Rp Miliar)	Sesudah (Rp Miliar)	Perubahan (Rp Miliar)	Perubahan (%)	Perubahan APBD	Kota
Belanja Operasi	728,97	726,08	-2,89	-0,40%	Bukittinggi tahun 2024 mencerminkan strategi pembangunan yang	
- Belanja Pegawai	347,05	344,17	-2,88	-0,83%	berorientasi pada peningkatan	
- Belanja Barang dan Jasa	317,76	319,20	1,44	0,45%	Konektivitas dan infrastruktur jaringan	
- Belanja Subsidi	2,50	2,50	0,00	0,00%	sebagai penggerak pertumbuhan	
- Belanja Hibah	58,14	56,95	-1,19	-2,04%	ekonomi jangka panjang. Alokasi	
- Belanja Bantuan Sosial	3,52	3,26	-0,27	-7,52%	signifikan pada belanja modal jalan,	
Belanja Modal	67,20	70,56	3,36	5,00%	jaringan, dan irigasi yang meningkat	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,42	14,35	-2,07	-12,63%	86,52% sejalan dengan teori	
- Belanja Modal Gedung	38,81	34,53	-4,28	-11,02%	pembangunan regional yang	
					menekankan pentingnya infrastruktur	
					transportasi dalam mengurangi biaya	
					transaksi dan meningkatkan	
					produktivitas ekonomi (Calderón &	

Servén, 2010; Kodongo & Ojah, 2016). Investasi infrastruktur telah terbukti memiliki dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan akses pasar, mobilitas faktor produksi, dan daya tarik investasi (Estache et al., 2005).

Penurunan defisit anggaran sebesar 33,88% mengindikasikan perbaikan kesehatan fiskal daerah yang penting untuk keberlanjutan pembangunan. Kemampuan mengurangi defisit sambil meningkatkan belanja modal menunjukkan efektivitas manajemen fiskal pemerintah daerah (Boex, 2024). Namun, ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer (80,18% dari total pendapatan) menunjukkan kerentanan fiskal terhadap perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat (Bird & Ebel, 2018). Rasio PAD yang rendah (19,82%) mengindikasikan perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal (Zhang et al., 2016).

Strategi realokasi dari belanja gedung dan bangunan ke infrastruktur jaringan mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan

dari pembangunan fisik gedung pemerintahan menuju investasi infrastruktur produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan seperti jalan dan irigasi memiliki elastisitas output yang lebih tinggi dibandingkan infrastruktur gedung (Calderón & Servén, 2010). Peningkatan belanja modal sebesar 5% dengan prioritas pada infrastruktur jaringan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata yang menjadi keunggulan komparatif Kota Bukittinggi (Kodongo & Ojah, 2016).

D. Kesimpulan

Analisis APBD Perubahan Kota Bukittinggi tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan pendapatan daerah sebesar 2,30% didukung terutama oleh kenaikan signifikan pendapatan transfer antar

daerah sebesar 56,90%, meskipun kemandirian fiskal masih rendah dengan rasio PAD hanya 19,82%. Realokasi belanja menunjukkan prioritas pada belanja modal yang meningkat 5%, khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang naik 86,52%, dengan mengurangi belanja operasi sebesar 0,40% untuk meningkatkan efisiensi. Penurunan defisit anggaran sebesar 33,88% mengindikasikan perbaikan kesehatan fiskal daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya intensifikasi PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi infrastruktur yang telah dialokasikan dilaksanakan secara efektif dengan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menjamin dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara belanja modal dan belanja operasi agar tetap dapat memberikan pelayanan publik berkualitas sambil

mendorong investasi infrastruktur. Penelitian lanjutan dengan data time series multi tahun dan analisis dampak langsung investasi infrastruktur terhadap indikator ekonomi makro regional diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, H. D., Mailindra, W., & Amali, M. (2024). Pengaruh dana APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1908-1913.
- Bird, R. M., & Ebel, R. D. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. International Studies Program. Edward Elgar Publishing.
- Boex, J. (2024). *Fiscal decentralization, local public sector finance, and intergovernmental fiscal relations: A primer on multilevel government finance*. Urban Institute and International City/County Management Association.
- Boex, J., & Martinez-Vazquez, J. (2006). *Local government finance reform in developing countries: The case of Tanzania*. International Studies Program Working Paper.

- Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl_1).
- Estache, A., Speciale, B., & Veredas, D. (2005). How much does infrastructure matter to growth in Sub-Saharan Africa? *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Kodongo, O., & Ojah, K. (2016). Does infrastructure really explain economic growth in Sub-Saharan Africa? *Review of Development Finance*, 6(2), 105-125.
- Mandey, A. (2022). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 101-109.
- Marlina, L. (2023). Analisis kinerja APBD provinsi di Indonesia: Sebuah studi mengenai rasio keuangan, korelasi metrik dan klasterisasi kinerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 547-563.
- Sahrudin, S. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10(2), 150-156.
- Voitenko, V., Oliinyk, O., Frolov, S., Mishchuk, H., & Bilan, Y. (2022). Macroeconomic dimensions of public transparency in local governance and financial decentralization of regions in the context of sustainable development. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 3(44), 223-232.